

KERJASAMA INDONESIA - BELANDA DI BIDANG TATA KELOLA AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012-2017 (STUDI KASUS PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA JAKARTA)

Alfari Rezki Elfandari

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Komputer Indonesia, Jl Dipatiukur 112-114, Bandung, 40132, Indonesia

Email:
alfarirezki1104@gmail.com

Abstract

This paper is motivated by the problem of flooding that continues to hit the Jakarta area. Flooding often occurs in Jakarta because the carrying capacity of the Jakarta environment and its surroundings is no longer there because development cannot ignore the environmental spatial aspects. Indonesia also cooperates with the Netherlands with the signing of the Water MoU, which is in it and also contains air management (flooding). This paper aims to find out, explain, view, and analyze the cooperation between Indonesia and the Netherlands in the field of Water and Environment Governance in 2012-2017 in the City of Jakarta. Hopefully in the future it is expected that Jakarta will no longer experience flooding.

Keyword: Flood, Water Management, Jakarta

Asbtrak

Tulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan banjir yang terus melanda wilayah Jakarta. Banjir sering terjadi di Jakarta karena faktor daya dukung lingkungan Jakarta dan sekitarnya sudah tidak ada lagi karena sudah tergantikan dengan pembangunan insfrastruktur yang tidak menghiraukan aspek tata ruang lingkungan sehingga menyebabkan terlampauinya daya dukung lingkungan. Indonesia pun bekerjasama dengan Belanda dengan ditanda tangannya MoU mengenai Air, dimana didalamnya juga terdapat mengenai tata pengelolaan air (banjir). Tulisan ini berujuan untuk mengetahui, menjelaskan, melihat, dan menganalisis kerjasama Indonesia-Belanda dibidang Tata kelola Air dan Lingkungan Hidup tahun 2012-2017 di Kota Jakarta. Sehingga kedepannya diharapkan Jakarta tidak mengalami banjir lagi dengan dilakukannya kerjasama ini.

Kata kunci: Banjir, Tata Kelola Air, Jakarta

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam mendiskusikan lingkungan hidup perlu diketahui apa itu lingkungan hidup. Istilah lingkungan hidup bisa digunakan lingkungan yang umum untuk menggambarkan dimana kita dan apa yang melingkupi kita. Manusia hidup di bumi tidak sendirian melainkan bersama makhluk lain seperti tumbuhan, hewan, dan jasad renik. Manusia bersama tumbuhan dan jasad renik juga benda tak hidup lain menempati suatu ruang tertentu yang disebut lingkungan hidup makhluk tersebut. Menurut UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna bagi kehidupan makhluk hidup, salah satunya adalah manusia. Sangat jelas bahwa seluruh manusia membutuhkan air bersih, khususnya air bersih untuk keperluan sehari-hari. Sumber daya air di Indonesia menghadapi permasalahan dan tantangan yang meningkat setiap tahunnya, salah satunya adalah masalah banjir. Penyebab banjir secara umum adalah akibat tingginya intensitas curah hujan, namun Daya Dukung Lingkungan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir. Eksploitasi sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur yang tidak menghiraukan aspek tata ruang menyebabkan terlampauinya daya dukung lingkungan, yang diakibatkan oleh aktivitas yang tidak ramah lingkungan seperti penambangan tambang ilegal, bergantinya fungsi lahan dibantaran sungai, berkurangnya pohon dan daerah resapan air. Contohnya seperti banjir yang seringkali terjadi di ibukota Indonesia, Jakarta.

Melihat hal ini, akhirnya Indonesia bekerjasama dengan negara Belanda yang terkenal dengan sistem pengelolaan airnya yang canggih, karena topografi Belanda sama seperti Jakarta yang berada dibawah permukaan laut. Tujuan utama dari kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda dibidang tata kelola/pengelolaan sumber daya air adalah untuk melanjutkan dan meningkatkan kerjasama di bidang air secara terpadu, menjaga ketersediaan air, perlindungan terhadap banjir dan pengelolaan sumber daya air terpadu (termasuk air tanah). Selain itu juga penyediaan air untuk makanan dan ekosistem, penyediaan air dan sanitasi (termasuk kontribusi terhadap pelaksanaan tujuan pembangunan milenium), air dan iklim (<http://bwssum1.net/index.php/berita/datin-sda/item/kerjasama-indonesia-belanda-bidang-air-dan-lingkungan>).

Berdasarkan uraian diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait **“Kerjasama Indonesia-Belanda Di Bidang Tata Kelola Air dan Lingkungan Hidup tahun 2012-2017 di Kota Jakarta.**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Kerjasama Indonesia-Belanda di Bidang Tata Kelola Air dan Lingkungan Hidup dalam Penanggulangan Banjir di Kota Jakarta Tahun 2012-2017?

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penelitian ini adalah berharap bisa menjawab rasa keingintahuan peneliti, juga agar masyarakat umum mengetahui kerjasama dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda dalam mengembnagkan sistem tata kelola air di kota Jakarta. Dan juga untuk mengetahui memahami juga menganalisa upaya-upaya yang dilakukan, kendala yang dihadapi, dan hasil dari kerjasama Indonesia-Belanda dibidang tata kelola air dan lingkungan hidup tahun 2012-2017 di kota Jakarta.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti serta memberikan/ menambah pembendaharaan pustaka, juga dapat memberikan sedikit sumbangan ilmu pengetahuan untuk studi Ilmu Hubungan Internasional mengenai kerjasama tersebut. Juga diharapkan dapat memberikan solusi bagi pemerintah agar bisa menyelesaikan masalah banjir, tidak hanya didaerah Jakarta tetapi juga didaerah-daerah di Indonesia yang rentan terkena banjir, sehingga Indonesia bisa terbebas dari masalah banjir dimasa yang akan datang.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Hubungan Internasional

Ilmu hubungan internasional merupakan pendatang baru dalam deretan ilmu-ilmu sosial lainnya, berdiri sendiri kira-kira pada tahun 30-an, dimulai dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya berupa penelitian dan pengkajian akademis.

Banyak definisi yang dikemukakan mengenai apa yang dimaksud dengan studi hubungan internasional. Menurut Karen menyatakan bahwa hubungan internasional adalah studi yang mempelajari tentang interkasi diantara berbagai macam actor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang mencakup negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintahan lokal, dan para

individu, yang intinya mengenai perilaku dari aktor-aktor tersebut apakah mereka berhasil berpartisipasi secara sendiri-sendiri/ bersama-sama dalam proses politik internasional.

Steve Chan mendefinisikan hubungan internasional sebagai interaksi antara aktor-aktor yang tindakan-tindakannya/ kondisi-kondisinya memiliki konsekuensi akibat yang penting bagi pihak-pihak lain diluar yurisdiksi efektif unit politik (negara) mereka (Ambarwati dan Subarno, 2016: 4-5).

Mengutip dari Norman D. Palmer dan Howard C. Perkins dalam bukunya yang berjudul *International Relations* menyatakan bahwa hubungan internasional sekarang merupakan suatu studi dan masyarakat dunia dalam masa peralihan/masa transisi. Banyak asas-asas/prinsip-prinsip dan faktor-faktor dalam hubungan internasional tidak mengalami perubahan, tetapi suasana/ lingkungan internasional-lah yang sudah berubah dan masih terus berubah” (Darmayadi, 2015: 25).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan. Bentuk dalam kerjasama international berdasarkan banyaknya negara yang melakukan hubungan kerjasama dibedakan seperti menjadi kerjasama bilateral, multilateral, trilateral, dan juga regional. Pola-pola yang terbentuk dari proses interaksi dilihat dari kecenderungan tujuan dan sikap dari pihak-pihak yang melakukan hubungan kerjasama tersebut (Perwita dan Yani, 2014: 33-34).

2.1.3 Hubungan Bilateral

Interaksi ataupun perjanjian dalam melakukan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Ruang lingkup hubungan internasional mulai dari politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup dan hak asasi tentunya juga menjadi salah satu atau lebih dari sebuah isu dalam hubungan bilateral. Dalam hubungan kerjasama yang dijalin antar dua negara diharapkan menjadi hubungan yang saling mengisi kepentingan masing-masing. Adapun upaya kerjasama tersebut tidak mengabaikan hak kedaulatan suatu negara.

Bentuk-bentuk interaksi dan kerjasama dapat dibedakan berdasarkan pihak yang melakukan hubungan antarnegara yang menjadi hubungan bilateral, hubungan trilateral, hubungan regional, dan hubungan multilateral/ internasional. Kerjasama yang terbentuk dari

berbagai komitmen sebgai individu untuk mencapai kesejahteraan secara kolektif yang merupakan sebagai hasil adanya persamaan kepentingan (Rudy, 2003: 5).

2.1.4 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional dapat dirumuskan secara luas sehingga perlu memasukkan pertimbangan-pertimbangan moral, agama, kesejahteraan dan hal-hal yang bersifat altruistis lainnya. Dalam praktek sebenarnya kepentingan nasional tidak hanya dibuat oleh seorang negarawan yang menganut teori Hegel yang menyatakan bahwa negara adalah kebaikan yang tertinggi , tetapi juga bisa dibuat oleh negarawan lain yang percaya bahwa negara semata-mata hanya merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya. Keduanya bisa saja membuat penafsiran yang sama mengenai kepentingan nasional sepanjang negara benar-benar bertanggung jawab atas kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan sosial warga negaranya.

Kepentingan nasional diakui sebagai konsep kunci dalam politik luar negeri. Sepanjang mengenai kepentingan nasional, orang bisa berorientasi kepada ideologi/kepada sistem nilai sebagai pedoman perilaku. Selanjutnya Dr. Budiono mengatakan bahwa dalam kenyataannya berbagai sasaran politik luar negeri dapat mencakup lebih dari satu sifat sekaligus. Kepentingan nasional jarang dapat dibaca secara sederhana, aspeknya sering tidak dapat ditafsirkan secara eksklusif. Kepentingan nasional selalu berkaitan erat dengan keamanan, kesejahteraan, dan juga power (Soeprapto, 1997: 143-151).

2.1.5 Perkembangan Isu Lingkungan Hidup dalam Hubungan Internasional

Dalam mendiskusikan lingkungan hidup perlu diketahui apa itu lingkungan hidup. Istilah lingkungan hidup bisa digunakan lingkungan yang umum untuk menggambarkan dimana kita dan apa yang melingkupi kita. Manusia hidup dibum tidak sendirian melainkan bersama makhluk lain seperti tumbuhan, hewan, dan jasad renik. Manusia bersama tumbuhan dan jasad renik juga benda tak hidup lain menempati suatu ruang tertentu yang disebut lingkungan hidup makhluk tersebut. Menurut UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Budi Winarno, 2014: 138-139).

Pengertian lain mengenai lingkungan hidup yaitu lingkungan hidup merupakan ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda tak-hidup lainnya. Makhluk hidup

tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupannya melainkan berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya (Soemarwoto, 2001: 48).

Isu mengenai lingkungan hidup telah menjadi agenda global memasuki abad 21, baik dikalangan pemimpin politik, pejabat pemerintah, ilmuwan, industrialis, LSM, maupun warga negara. Ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan yang sebelumnya dianggap berada pada wilayah *low politics* kemudian diakitkan dengan isu-isu sentral politik dunia. Isu lingkungan telah menjadi isu global yang sangat penting mendampingi agenda klasik dalam politik internasional, yakni isu keamanan dan ekonomi.

Isu lingkungan hidup mulai muncul dan diperdebatkan setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

1. Dengan berakhirnya rivalitas ideologi maupun militer antara AS dan Uni Soviet, maka terdapat kesempatan untuk membahas isu-isu lain yang kemudian menjadi perdebatan dikalangan negara-negara Barat.
2. Adanya kesadaran publik dan media terhadap perubahan lingkungan global karena terdapat gejala-gejalanya yang mengindikasikan terjadinya degradasi lingkungan global.
3. *Scientific communities* mulai membeberkan hasil-hasil penelitian mereka dan memberikan informasi terkait dengan kondisi lingkungan kepada para pembuat kebijakan.

Dalam perkembangannya, kepedulian terhadap isu lingkungan hidup semakin meningkat dan meluas, kemudian menjadi isu global yang disebabkan diantaranya banyaknya proses eksploitasi yang berlebihan/degradasi lingkungan hidup yang secara relative dalam skala local/nasional, dan ini terjadi disekeliling besar tempat diseluruh dunia, yang kemudian dipandang sebagai masalah-masalah global.

Sekalipun gerakan lingkungan telah ada sejak masa lalu, namun para pengamat sepakat bahwa gerakan lingkungan mulai berkembang pesat sejak akhir tahun 1950-an, dengan indikator meningkatnya perhatian publik dan aktivis lingkungan, ditandai dengan munculnya kelompok pemerhati lingkungan di Amerika Serikat (AS) dan di Inggris yang dikenal dengan "*Green Party*". Gerakan lingkungan dalam masa ini memiliki karakteristik yang khas, yaitu tampil dalam bentuk gerakan massa dan mengedepankan interdependensi antar-masalah lingkungan ketimbang gerakan berisu tunggal (Budi Winarno, 2014: 138-140).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan Belanda merupakan salah satu bentuk dari interaksi antar-aktor dalam menjalin sebuah hubungan internasional (mencakup kerjasama internasional dan hubungan bilateral). Adanya hubungan tersebut sebagai akibat dari adanya saling ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Karena setiap negara pasti membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan di negaranya dan untuk mencapai kepentingan dari tujuan bersama. Dalam hal ini dapat dilihat dari latar belakang kerjasama Indonesia dengan Belanda yang terjalin sudah cukup lama. Indonesia dan Belanda telah menjalin kerjasama diberbagai bidang, baik itu politik, ekonomi, sosial-budaya, keamanan, pendidikan, maupun dalam bidang air.

Kerjasama internasional yang terjalin antara Indonesia dan Belanda merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional dari suatu negara. Yang mana kepentingan nasional ini merupakan suatu bentuk dari sebuah negara yang membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Dalam hubungan internasional, kepentingan nasional dari suatu negara dapat menjadi pendorong dilakukannya berbagai interaksi internasional diberbagai bidang seperti dalam bidang air. Karena hal tersebut terjadilah hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang menjalin hubungan kerjasama dalam bidang air.

Indonesia mempunyai kepentingan nasional, dimana kepentingan nasional tersebut melihat bahwa Belanda mampu mengatasi masalah banjir dinegaranya, yang mana kita tahu daratan Belanda lebih rendah daripada lautannya, dan masalah banjir rob pun sering dialami oleh Belanda dulu. Tetapi setelah membangun berbagai banyak tanggul raksasa dan juga polder-polder air kini Belanda tidak khawatir lagi dengan masalah banjir. Sama halnya dengan Belanda, dataran ibukota Jakarta daratannya juga lebih rendah daripada lautannya sehingga sering terkena banjir rob. Kurangnya lahan terbuka hijau dan sistem sanitasi yang buruk mengakibatkan Jakarta sering dilanda banjir besar, apalagi ketika musim hujan tiba. Karena hal tersebut, kepentingan nasional Indonesia adalah ingin agar bisa seperti negara Belanda yang mana bisa mencegah dan menanggulangi bencana banjir dengan bekerjasama dalam membangun tanggul-tanggul raksasa yang terdapat di pesisir pantai Jakarta juga menggunakan sistem polder air, agar jika terjadi banjir air langsung bisa dialihkan kelaut, dan kerjasama ini tidak hanya diterapkan di Jakarta saja melainkan di kota-kota lain di Indonesia juga diterapkan seperti proyek percontohan sistem polder air yang ada di Kota Tua Semarang.

Sedangkan bagi Belanda sendiri kepentingan nasionalnya adalah mereka bisa menunjukkan bahwa mereka telah berhasil dalam menanggulangi banjir yang dari dulu menghantui negara Belanda. Belanda bisa memperkenalkan inovasi teknologi dan metodologi

yang dipakai dalam menanggulangi banjir, memberikan pertukaran informasi dan keterampilan teknis dengan memberangkatkan ahli-ahli dari Indonesia ke Belanda untuk melihat secara langsung dan mempelajarinya, memberi informasi riset dan juga pengembangan teknologi yang tepat dan murah untuk diterapkan di Indonesia, dan lain sebagainya.

3. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Tata Kelola Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan persentase luas wilayah lautnya mencapai 64,97% dari total wilayah Indonesia (<https://kkp.go.id/artikel/maritim-indonesia>). Begitu pula dengan banyaknya sungai-sungai yang mengalir diberbagai wilayah daratan Indonesia. Hampir disetiap kota/kabupaten dan provinsi di Indonesia dialiri oleh sungai, baik itu sungai yang kecil maupun besar, yang pendek maupun panjang. Bahkan di Indonesia saat ini terdapat 5.950 daerah aliran sungai (DAS). Sungai sendiri adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). Sungai juga merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Pemanfaatan terbesar sebuah sungai adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya potensial untuk dijadikan objek wisata sungai (<https://www.daftarinformasi.com/nama-sungai-di-indonesia>).

Dalam hal tata kelola air bukan hanya penanggulangan setelah terjadi yang dilakukan, tapi juga antisipasi atau pencegahan. Dalam skala yang lebih besar pemerintah harus lebih ketat dalam menjaga kelestarian hutan. Atau melakukan penghijauan pada lahan-lahan kritis. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai, bahwa selama ini persoalan lingkungan hidup di Indonesia adalah sistem ekonomi kapitalisme, diperkuat oleh rezim neo-liberalisme dan militeristik yang melihat kekayaan alam hanya sebagai komoditas tanpa pernah mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan, serta mendelegasikan seluruh penguasaan dan pengelolaan kekayaan alam kepada korporasi skala besar. Atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, rakyat dan alam hanya dijadikan objek, sehingga negara justru membenarkan praktik perampasan tanah, air dan seluruh sumber-sumber kehidupan rakyat ataupun sumber-sumber agrarian (<https://walhi.or.id/platform-politik-lingkungan-hidup-indonesia-memperkuat-gerakan-rakyat-mewujudkan-keadilan-ekologis>).

3.1.2 Tata Kelola Air dan Lingkungan Hidup di Belanda

Ternyata Belanda tidak hanya memanfaatkan kecanggihan bendungan dan kincir angin saja dalam mengelola air. Belanda mempunyai sistem *eco-drainage* yang sangat ramah lingkungan. Eco artinya ekologi yaitu hal berkaitan dengan alam, sedangkan drainase adalah mengalirkan. Selain mampu berkontribusi mengurangi peluang banjir, sistem ini mampu menjaga kualitas air. Ekodrainase berasal dari pemikiran eco-hidrology yang pertama kali dikenalkan tahun 1982 oleh peneliti Belanda, Van Wirdum. Pada dasarnya Van Wirdum ingin menemukan keterkaitan antara unsur air dengan unsur vegetasi. Bertahun-tahun kemudian pemikiran ini berkembang menjadi sebuah sistem kelola air ramah lingkungan.

Selain itu pemerintah Belanda juga membangun Polder. Sistem Polder ini digunakan pemerintah Belanda untuk menghadang banjir serta mengontrol ketinggian air. Polder merupakan sebidang tanah yang rendah, dikelilingi oleh tanggul yang membentuk semacam kesatuan hidrologis buatan. Ini artinya tak ada kontak dengan air dari daerah luar, selain yang di alirkan melalui perangkat manual ke tempat tersebut. Air buangan seperti air hujan dikumpulkan ke area Polder ini, dan dipompa ke sungai atau kanal yang langsung bermuara ke laut. Polder merupakan sistem tata air tertutup dengan meliputi berbagai elemen seperti tanggul, pompa, saluran air, kolam retensi, pengaturan lahan dan instalasi air kotor terpisah (<http://sl.life.ku.dk>).

2.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Untuk menganalisis hal tersebut peneliti melakukan penelitian langsung kelapangan, sehingga dengan demikian peneliti terlibat dengan penelitian yang dilakukan. Observasi dilakukan ke instansi terkait dengan penelitian ini. Selain itu juga peneliti melakukan penelusuran online dan dokumen resmi dari instansi yang terkait, baik berupa abuk, tulisan di media resmi maupun elektronik, mengkaji dokumen-dokumen berupa kategori umum.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Upaya penanggulangan banjir di Jakarta dalam kerjasama Indonesia-Belanda dibidang tata kelola air dan lingkungan hidup tahun 2012-2017

Segala upaya telah dilakukan kedua negara agar tidak terjadi banjir lagi, seperti Belanda memberikan bantuan berupa pertukaran informasi keterampilan teknis tentang strategi pengoperasian dan pemeliharaan saluran air. Upaya pengendalian banjir lainnya

dengan cara konvensional yang dilakukan dengan pembangunan waduk, situ, sumur resapan, pengerukan sungai, dan tanggul. Tidak hanya itu, dalam kerjasama di atas Indonesia dan Belanda juga membuat kelompok kerjasama (*working group*) yang mana kelompok kerjasama ini menjadi tim pengarah instansi-instansi terkait untuk menanggulangi banjir. Pertemuan kelompok kerjasama ini diadakan setiap 2 tahun sekali secara bergantian yang diadakan oleh kedua negara.

Dalam keputusan ketua Tim 1 Pengarah Kerjasama Indonesia-Belanda dalam bidang Keairan Nomor 22/KPTS/2016 telah menetapkan kelompok kerjasama Indonesia-Belanda yang disebut *working group* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari keputusan Ketua I Tim Pengarah Nasional kerjasama Indonesia-Belanda dalam bidang keairan:

a. *Working group* terdiri dari:

1. Ketua.
2. Wakil ketua.
3. Anggota.

b. Terdapat tiga *Working Group* dalam kerjasama ini, yaitu:

1. *Working Group on Water Management.*
2. *Working Group on Water for Food and Ecosystems.*
3. *Working Group on Water Supply and Sanitation.*

c. *Working group* bertugas:

1. Menyusun konsep kegiatan kerjasama, termasuk upaya tindak lanjut dari kegiatan kerjasama yang telah berjalan, dan
2. Mempersiapkan usulan *project digest*.

d. Ketua bertugas:

1. Mengatur pembagian tugas kerja pada *working group*.
2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan ketua *working group* Belanda.

3. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan untuk disampaikan dan dilaporkan kepada ketua tim pengarah nasional kerjasama Indonesia-Belanda dalam bidang keairan.
 4. Mengkoordinasikan kegiatan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program kerjasama dan melaporkannya kepada ketua tim pengarah nasional kerjasama Indonesia-Belanda dalam bidang keairan.
 5. Mendukung tim sekretariat nasional dalam melaksanakan tugas administrasi dan pelaporan.
- e. Wakil ketua bertugas:
1. Melakukan pembagian tugas kepada *working group* yang dipimpinnya.
 2. Melakukan evaluasi terhadap usulan kegiatan/program dan menyusun serta mengusulkan program kerja tahunan kepada ketua.
 3. Melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi terhadap kegiatan yang berada dalam lingkup *working group*-nya dan melaporkannya kepada ketua.
 4. Berkoordinasi dengan tim sekretariat nasional dalam melaksanakan tugas administrasi dan pelaporan.
- f. Anggota bertugas:
1. Membantu wakil ketua dalam penyusunan program tahunan.
 2. Membantu wakil ketua dalam melakukan evaluasi terhadap usulan kegiatan/program dan menyusun serta mengusulkan program kerja.
 3. Membantu wakil ketua untuk melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi terhadap kegiatan yang berada dalam lingkup kerja *working group*-nya.
 4. Membantu tim sekretariat nasional dalam melaksanakan tugas administrasi dan pelaporan.

4.2 Kendala yang dihadapi Indonesia-Belanda dalam bidang tata kelola air dan lingkungan hidup tahun 2012-2017 terkait penanggulangan banjir di Jakarta

Pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) tengah membangun dua bendungan di Ciawi dan Sukamahi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembangunan telah direncanakan sejak 2004 tetapi baru mulai terealisasi pada September 2017. Dua bendungan tersebut akan mengurangi volume banjir kiriman dari Bogor ke Jakarta. Waktu tiba air kiriman dari Bogor di Jakarta melalui pintu air Manggarai juga bisa diperpanjang selama 4 jam atau yang biasanya tiba dalam waktu sembilan jam, menjadi 13 jam. Kedua bendungan tersebut ditargetkan konstruksinya selesai pada 2019. Volume air sampai ke bawah akan berikan efek sekitar 12% pengurangan debit air untuk masuk ke Pintu Air Manggarai karena bantu mengalirkan ke sungai-sungai.

Namun, pembangunan dua bendungan itu tidak berjalan begitu lancar karena terkendala biaya pembebasan lahan. Sejak mulai dibangun pada September 2017, konstruksi dua bendungan baru sampai 5%. Saat ini biaya pembebasan lahan masih ditalangi para kontraktor proyek sebesar Rp.230 miliar. BBWSCC bersama Pemprov DKI juga telah melakukan normalisasi Kali Ciliwung pada 2013-2017. Hasilnya, baru 16 kilometer (dari total 33 kilometer) aliran sungai sudah dinormalisasi.

4.3 Hasil kerjasama Indonesia-Belanda dibidang tata kelola air dan lingkungan hidup tahun 2012-2017 terkait penanggulangan banjir di Jakarta

Dalam kerjasama yang dilakukan antara Indonesia-Belanda banyak upaya-upaya yang telah dilakukan terkait penanggulangan banjir di Jakarta, dimana dalam MoU Indonesia-Belanda mengembangkan dan mengupayakan bidang kerjasama dalam MoU yang ditandatangani dari 2012-2015 sampai 2015-2019 yang mana isinya tidak jauh berbeda, guna mencapai tujuan bersama, yaitu:

1. Pertukaran tingkat tinggi berbasis tahunan tentang isu-isu strategis yang diarahkan pada tantangan terkait bidang keairan dan bermanfaat bagi kedua negara.
2. Proyek-proyek percontohan yang telah sejalan dengan tantangan strategis.
3. Semua kegiatan harus mempertimbangkan seluruh keputusan penanam modal pembangunan jangka panjang.

Ruang lingkup kerjasama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan berbasis pada pembangunan berkelanjutan meliputi, namun tidak terbatas pada:

1. Pengelolaan sumber daya air yang terpadu, keamanan, pengamanan dan kualitas air, pengelolaan banjir dan drainase perkotaan, perairan darat, pengembangan pelabuhan dan pesisir, pengelolaan air tanah.
2. Penyedia air bersih dan sanitasi.
3. Air untuk pangan dan ekosistem termasuk perlindungan dan revitalisasi pesisir.
4. Air dan iklim.
5. Tata pengelolaan dan peningkatan kapasitas, dan ruang lingkup lainnya dalam konteks yang disepakati bersama oleh Para Penandatanganan.

Bentuk kerjasama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian meliputi, namun tidak terbatas pada:

1. Pertukaran informasi dan keterampilan teknis.
2. Pengembangan riset, teknis, dan kapasitas.
3. Pertukaran tenaga ahli/personil.
4. Pengorganisasian beberapa pertemuan, simposium, konferensi, dan lokakarya.
5. Pelaksana program pelatihan dan pendidikan.
6. Pengenalan inovasi teknologi dan metodologi.
7. Proyek-proyek percontohan.
8. Riset dan pengembangan teknologi yang tepat dan murah.

9. Kerjasama para operator, dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh Para Penandatanganan.

Dalam kerjasama tersebut terdapat program unggulan yang bernama *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) atau dikenal dengan nama Tanggul Laut Raksasa. NCICD dirumuskan menjadi program terintegrasi untuk mengantisipasi beberapa isu utama seperti ancaman banjir, penurunan muka tanah, keterbatasan air baku, penambahan kawasan produktif melalui reklamasi dan revitalisasi dikawasan pantai. *Masterplan* NCICD tahun 2014 merupakan rencana pengembangan yang sinergis, komprehensif untuk mewujudkan pengembangan ibukota negara yang aman, layak dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat dalam peningkatan ekonomi, sosial dan perbaikan lingkungan. *Update masterplan* NCICD terbaru tahun 2016 merupakan rencana kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang bertujuan untuk melindungi ibukota dari ancaman banjir (rob maupun luapan air sungai ketika musim hujan tiba) serta mengintegrasikan revitalisasi wilayah pesisir Jakarta dengan peluang investasi reklamasi lahan.

NCICD penting karena laju penurunan muka tanah DKI Jakarta sebesar 2-20cm/tahun jika tidak dapat dikendalikan maka ancaman banjir dari laut dan sungai meningkat. Pada tahun 1990 hanya 12% atau 1.600 hektar daratan utara Jakarta berada dibawah permukaan laut. Diperkirakan pada tahun 2030 hampir 90% atau 12.500 hektar daratan pantai utara Jakarta akan tenggelam karena permukaan tanah lebih rendah dari muka air laut dan aliran sungai tidak bisa masuk ke laut secara gravitasi.

Reklamasi dikawasan teluk Jakarta perlu diintegrasikan dengan NCICD karena NCICD bertujuan untuk memproteksi keamanan Jakarta dari banjir dan tingginya air laut , juga pelambatan penurunan tanah perlu diintegrasikan dengan reklamasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mewujudkan kawasan strategis pantura Jakarta sebagai *waterfront city*.

Arahan presiden pada rapat terbatas pada tanggal 27 April 2016 menyebutkan:

1. Pembangunan NCICD tidak akan menimbulkan masalah sepanjang memenuhi 3 syarat, yaitu:
 - a. Aspek lingkungan, baik itu terkait dengan biota laut, hutan bakau, dan faktor lingkungan lainnya.
 - b. Aspek hukum/regulasi, pembangunan NCICD agar mengikuti aturan dan hukum yang berlaku serta pengawasan yang ketat.
 - c. Aspek sosial, proyek NCICD agar mengedepankan asas manfaat bagi rakyat, terutama nelayan, jangan sampai tidak diperhatikan atau ditinggalkan.
2. NCICD merupakan proyek jangka menengah dan jangka panjang. Untuk itu, upayakan agar NCICD dapat terintegrasi dengan 17 pulau yang ada dikawasan teluk jakarta, karena berdasarkan hitungan yang pernah ada seharusnya pembiayaan proyek dapat ditanggung oleh pihak swasta.
3. Perencanaan besar terkait pembangunan NCICD agar diselesaikan di Bappenas, karena ketiadaan rencana besar, seperti gambar/desain dapat menimbulkan
4. permasalahan seperti yang terjadi saat ini.
5. Bappenas agar dapat segera menyelesaikan rencana besar dan kemudian dapat mempresentasikannya kembali.

Rencana dan strategi pengembangan terpadu NCICD yaitu seperti:

1. Keamanan terhadap banjir dari sungai, hujan setempat, dan dari laut melalui 1) sistem tanggul laut dan sungai, 2) retensi dan drainase, 3) sistem pemompaan,
2. Pelambatan penurunan tanah, dengan 4) pengelolaan air tanah yang efektif, 5) substitusi air tanah dengan penyediaan air baku, dan 6) kualitas air dapat ditingkatkan melaluia penyediaan sistem pengolahan air limbah dan sanitasi,

3. Revitalisasi kawasan pesisir berdasarkan pendanaan multi-sumber dan subsidi silang (*cross-subsidy*) dari 7) pulau reklamasi, dan 8) *redevelopment* kawasan permukiman kumuh dan permukiman nelayan yang akan menambah nilai kawasan tersebut, serta 9) pengembangan transportasi darat dan pelabuhan laut.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Hubungan bilateral pemerintah Indonesia dengan Belanda sudah lama terjalin, baik dari bidang politik, ekonomi, sosial-budaya maupun pendidikan. Indonesia dan Belanda telah menjalin kerjasama dibidang tata kelola air dan lingkungan hidup. Kerjasama tentang air ini telah terjalin dari tahun 2001 sampai 2019 nanti. Upaya yang dilakukan Indonesia-Belanda dalam menanggulangi banjir di Jakarta adalah Belanda memberikan bantuan berupa pertukaran informasi keterampilan teknis tentang strategi pengoperasian dan pemeliharaan saluran air. Kendala yang dihadapi oleh Indonesia dan Belanda dalam kerjasama ini yaitu ketika membangun dua bendungan di ciawi dan sukamahi yang baru terealisasi September 2017, namun pembangunan dua bendungan itu tidak berjalan begitu lancar karena terkendala biaya pembebasan lahan. Hasil yang diperoleh Indonesia dalam kerjasama ini adalah seperti Belanda memberikan bantuan berupa pertukaran informasi keterampilan teknis tentang strategi pengoperasian dan pemeliharaan saluran air. Selain itu dari kerjasama ini menghasilkan juga program yang disebut dengan NCICD, yang dirumuskan menjadi program terintegrasi untuk mengantisipasi beberapa isu utama seperti ancaman banjir, penurunan muka tanah, keterbatasan air baku, penambahan kawasan produktif melalui reklamasi dan revitalisasi dikawasan pantai.

Diharapkan kedua negara lebih erat lagi hubungannya sehingga mampu untuk saling berkomunikasi lebih baik lagi agar setiap bentuk kerjasama yang ada dalam MoU dapat terlaksana dan dilakukan secara maksimal oleh kedua negara dan mampu mengatasi berbagai kendala yang ada dalam kerjasama dibidang tata kelola air dan lingkungan hidup sehingga upaya dan tujuannya bisa tercapai oleh kedua negara dan terealisasi dengan cepat.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku:

Ambarwati dan Subarno Wijatmadja. 2016. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Jawa Timur: Intrans Publishing.

Darmayadi, Andrias. 2015. *Mengenal Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Zavara.

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad. 2014. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rudy, Teuku May. 2003. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global*. Jakarta: Refika Aditama.

Soepaoto, R. 1997. *Hubungan Internasional-Sistem, Interaksi, dan Perilaku*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Winarno, Budi. 2014. *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Acuan dari artikel dalam website:

<http://www.voaindonesia.com/ri-belanda-jalin-kerja-sama-bidang-tata-kelola-air/>

<http://www.antaraneews.com/berita/walhi-banjir-dki-karena-turunnya-daya-dukung-lingkungan/>

<http://beritadaerah.co.id//kerjasama-indonesia-dengan-belanda-di-bidang-sumber-daya-air-terus-berlanjut/>

<http://www.pu.go.id/main/view-pdf/>

<http://news.detik.com/terobosan-pencegahan-banjir-dan-pengelolaan-air-yang-benar/>

<http://tirto.id/belajar-banjir-ke-negeri-belanda-bKNT/>